

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

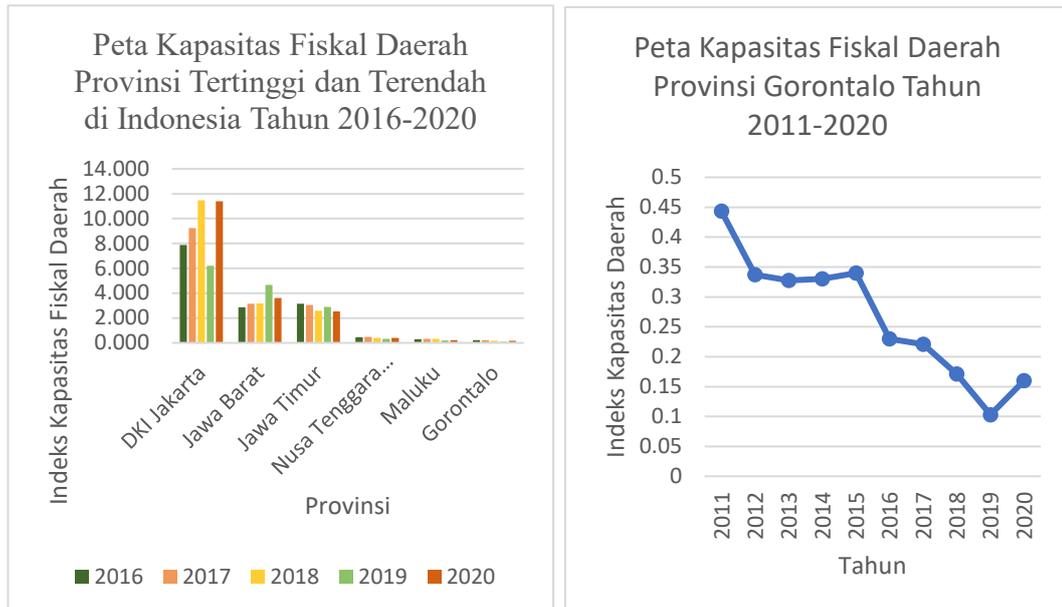
Meningkatkannya anggaran kinerja keuangan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik dijadikan sebagai sebuah upaya restrukturisasi dan evaluasi kinerja dari periode ke periode dengan menciptakan perbandingan suatu skema kerja serta yang pelaksanaannya menjadi tolak ukur dari tiap periode untuk peningkatan kemandirian sumber pembiayaan publik dan peningkatan kinerja pemerintahan yang ada. Tingkat kemandirian kinerja keuangan daerah tersebut salah satunya yang dicerminkan melalui gambaran kapasitas fiskal menunjukkan kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah dalam membiayai secara mandiri kegiatan operasional pemerintahan, peningkatan laju program pembangunan, dan peningkatan status pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah pusat harus senantiasa untuk mendorong kemandirian keuangan daerah karena dengan memberikan kesempatan tersebut pemerintah daerah akan merencanakan, mengembangkan, dan mengendalikan sendiri anggarannya yang nantinya akan meningkatkan efisiensi keuangan pemerintah (Rosen & Gayer, 2008). Rosen dan Gayer memiliki teori bahwa dalam keuangan negara tetap membutuhkan keikutsertaan pemerintah pusat sebagai pencipta aturan kebijakan dalam ekonomi agar mampu menciptakan kondisi yang efisien dan stabil di daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena besarnya jumlah transfer dari pusat kepada pemerintah daerah terus mengalami kenaikan sebagai akibat dari naiknya jumlah akses pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada publik. Pendapatan utama daerah yang berasal dari perolehan nilai pajak daerah belum dapat untuk menyamai pertumbuhan pengeluaran program pemerintah daerah yang diinginkan mengakibatkan kendala pada anggaran keuangan pada pemerintah daerah yang ada di Indonesia apabila belum mampu untuk mandiri secara fiskal diakibatkan masih banyaknya daerah bertopang pada upaya dana transfer umum pusat untuk keperluan pembiayaan pengeluaran atas belanja di daerah (Kartika, 2015).

Kapasitas fiskal berfokus pada kapabilitas dari negara yang selanjutnya derivatif kepada daerah untuk menjalankan solusi atas permasalahan terkait dengan

efisiensi pengeluaran atau meningkatkan tambahan pendapatan dalam APBD dimana setiap daerah perlu mengatur bagaimana daerah yang dipimpin oleh pemerintah daerah untuk memperoleh upaya pendapatan keuangan dan bagaimana strategi/tujuan dari penggunaan pendapatan keuangan tersebut sebaik mungkin sesuai target strategi prioritas pembangunan kebijakan di masing-masing daerah agar semakin mandiri. Tugas dan kewajiban pembangunan serta pelaksanaan kebijakan akan mampu untuk berjalan dengan baik apabila didukung dengan adanya kapasitas fiskal daerah yang tinggi guna meningkatkan kemampuan potensi ekonomi daerah terhadap kenaikan kemandirian keuangan daerahnya. Secara umum jika menjurus pada kapasitas fiskal daerah dapat diartikan pada tingkat kapabilitas keuangan daerah dalam mengumpulkan sumber pendapatan berdasarkan sumber-sumber penerimaan serta hasil pendapatan daerah yang dimilikinya untuk membiaya aktivitas maupun program pelayanan dan kebijakan di daerah yang dilihat dari proporsi skor Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD).

Kapasitas fiskal daerah sebagai masalah utama pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah umumnya bergantung dari kualitas kebijakan pemerintah daerah dalam prioritas kebijakan yang tepat sehingga akan menentukan besaran peningkatan kapasitas fiskal daerah yang diraihinya untuk secara mandiri mengelola keuangan daerah (Sriyana, 2015). Indonesia sebagai negara administratif, dimana didalamnya terdapat banyak pembagian kekuasaan dari yang tertinggi hingga terendah khususnya kepada pemerintah provinsi Tingkat I yang selanjutnya diturunkan hingga ke pemerintahan wilayah kabupaten/kota yang merupakan Daerah Tingkat II. Adapun dalam tahun penelitian ini dimana Indonesia terdiri atas 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Berdasarkan draft peraturan dalam Jaringan Informasi dan Dokumen Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian diklasifikasikan menjadi data peta indeks kapasitas fiskal daerah berdasarkan pembagian administratif daerah tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Kapasitas Fiskal dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa Provinsi DKI Jakarta mendominasi sebagai daerah dengan skor indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi di Indonesia, bertolakbelakang dengan Provinsi Gorontalo yang terus menjadi provinsi dengan tingkat skor indeks perolehan kapasitas fiskal terendah.



Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkeu RI, (2022)

Grafik 1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Tertinggi dan Terendah di Indonesia Tahun 2011 – 2020

Data pada Grafik 1 mengenai peta kapasitas fiskal daerah provinsi dari tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa terdapat 3 provinsi dengan tingkat kapasitas fiskal daerah yang paling tinggi pertama ada DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Jawa Timur dimana rata-rata skor IKFD provinsinya berada ≥ 2 . Untuk 3 provinsi dengan tingkat kapasitas fiskal daerah terendah atau paling tidak mandiri yaitu meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dan terakhir di posisi terakhir adalah Provinsi Gorontalo dengan tingkat kapasitas fiskal daerahnya berada dibawah rata-rata $< 0,5$. Melihat awal pembentukan Provinsi Gorontalo yang berdiri sejak tahun 2000 dan perkembangannya usia maupun kematangan pemerintahan baik secara ekonomi sampai saat ini terus mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan pemerintah daerahnya yang masih didukung dari besaran dana transfer mengakibatkan rendahnya tingkat kapasitas fiskal daerah provinsi sehingga hal tersebut mencerminkan kecenderungan tidak adanya kesesuaian antara kebutuhan program pemerintahan dengan besaran alokasi pembiayaan program dari APBD Provinsi. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian dana transfer merupakan kondisi yang umum terjadi oleh hampir semua wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Ketergantungan ini membawa konsekuensi lemahnya kemandirian

Martin Lutther, 2023

ANALISIS DETERMINAN PEMBENTUK KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011-2020

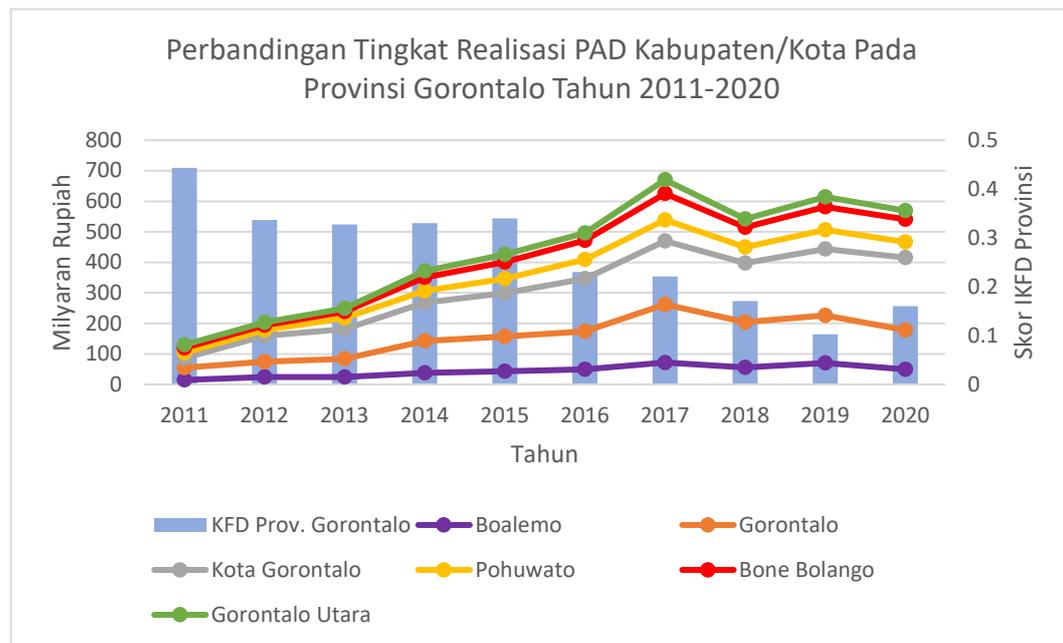
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
 [www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

daerah untuk melakukan berbagai kegiatan dan program yang harus dilakukan untuk membangun daerah (Muzdalifah, 2020).

Dapat pula dilihat data pada grafik kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo dari tahun 2011-2019 cenderung mengalami tren penurunan dimana titik terendah kapasitas fiskalnya berada pada kisaran 0,103. Dalam 10 tahun terakhir tahun yaitu pada tahun 2019 dimana tingkat kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo berada pada posisi terendahnya merupakan pengaruh yang diakibatkan ketidakstabilan tahun politik nasional, terlalu bergantungnya porsi anggaran APBD Provinsi Gorontalo terhadap transfer pusat guna penyelamatan aktivitas sosial Provinsi Gorontalo yang rawan terhadap kondisi bencana alam seperti kekeringan, gempa, banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Pada tahun sebelumnya penurunan indeks paling dalam sebesar 32% terjadi pada tahun 2018 atas tahun 2017 sebanyak -0,398 poin sehingga menjadi menjadi 0,171 yang mana hal tersebut diakibatkan isu strategis baik secara aspek ekonomi maupun aspek sosial. Secara ekonomi dilihat dari penyelesaian target infrastruktur sebagai akses layanan publik guna peningkatan kemajuan sosial ekonomi masyarakat daerah yang belum optimal dan terus dijalankan, kemudian melihat dari sisi sosial dimana adanya kebutuhan terhadap perlindungan sosial masyarakat yang mengalami kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Data kemudian menunjukkan pada tahun 2020 dimana seluruh daerah di Indonesia mengalami restrukturisasi anggaran, justru tingkat kemandirian kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan hingga 66% atas tahun 2019 yang berada pada skor indeks 0,103 sehingga berada pada skor indeks 0,160. Tingkat kemandirian keuangan daerah seharusnya berubah seiring waktu menuju semakin mandiri dan tidak hanya mengandalkan dana sokongan dari pemerintah pusat, dengan demikian kapasitas fiskal daerah provinsi Gorontalo seharusnya mampu ditingkatkan dengan menggunakan potensi-potensi daerah yang dimilikinya, namun merupakan suatu tantangan yang besar bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan program dan proyek strategis yang mampu untuk menyokong keuangan daerahnya secara mandiri (Rahmayani, 2018). Dalam hal ini khususnya APBD Provinsi Gorontalo tentunya meningkat setiap tahun mengingat terjadinya banyak perubahan dan strategis kebutuhan program

maupun perekonomian masyarakat di bawah naungan pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan kapasitas fiskalnya seharusnya semakin meningkat dan bukan menurun karena akan membahayakan kondisi perekonomian masyarakat khususnya produk nasional ataupun tingkat kemampuan untuk alokasi pembangunan dan program kesejahteraan daerah yang semakin menurun (Suhyanto, Juanda, Fauzi, & Rustiadi, 2017).



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, (2022)

Grafik 2 Perbandingan Tingkat Realisasi PAD Seluruh Kabupaten/Kota Pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020

Berdasarkan data pada grafik 2 melihat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo menurut Badan Pusat Statistik merupakan yang terendah se-Indonesia sehingga menyebabkan porsi terhadap tingkat kapasitas fiskalnya juga rendah. Berfokus pada data rata-rata realisasi dari dana PAD kabupaten/kota pada Provinsi Gorontalo pada tahun 2012-2019 mengalami tren kenaikan, hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Nilai realisasi PAD hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 berada pada titik tertingginya, namun tingkat kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo mengalami sedikit penurunan sebanyak 0.009 skor indeks yang selanjutnya pada 2020 saat terjadi pandemi COVID-19

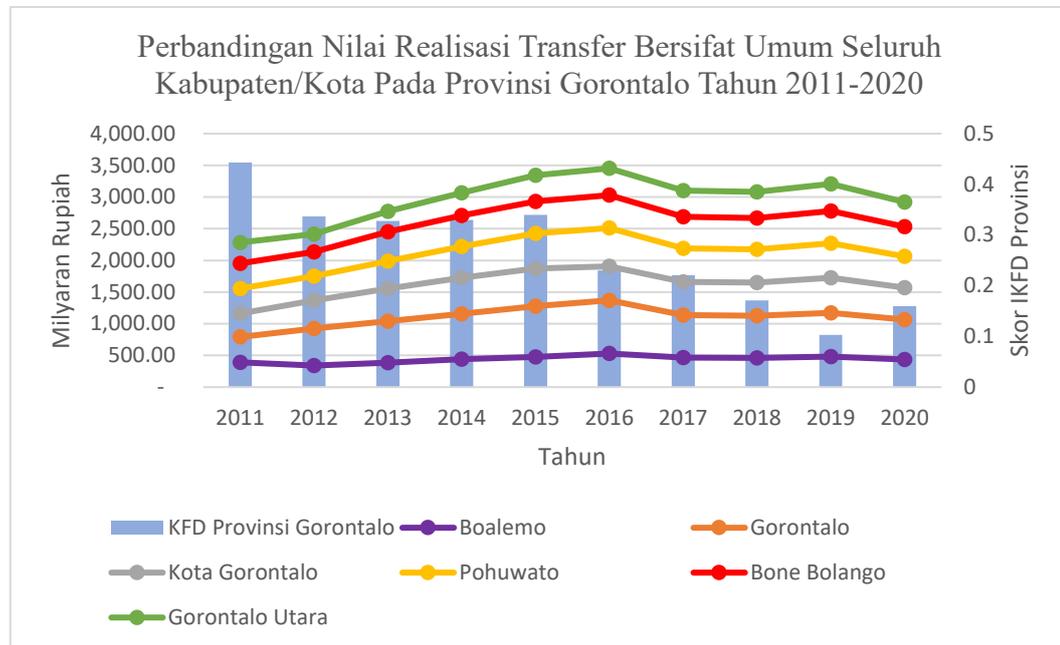
Martin Lutther, 2023

ANALISIS DETERMINAN PEMBENTUK KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011-2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dimana nilai realisasi atas PAD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo mengalami sedikit penurunan karena *rebudgeting* anggaran seharusnya tingkat kapasitas fiskal daerah provinsi Gorontalo mengalami penurunan justru terdapat kenaikan signifikan sebesar 0,057 skor indeks.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Laila, Triwahyuningtyas, & Aminda, 2021) dijelaskan apabila PAD perolehan bernilai tinggi, maka jumlah dana yang dimiliki oleh daerah guna membangun fasilitas layanan publik akan menjadi lebih besar serta tingkat kemandirian daerah juga semakin membaik, sebagai akibatnya suatu daerah berpeluang tinggi untuk mengembangkan perekonomiannya. Keadaan yang berbeda pada grafik data mengartikan bahwa karena metode pengambilan kebijakan yang ada, potensi PAD belum dapat tergali secara maksimal dalam mengembangkan keuangan daerah yang mandiri (Rosmawati, R, & Zamzami, 2015). Prioritas kebijakan yang tepat diambil oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah di provinsi Gorontalo akan menentukan besaran peningkatan kapasitas fiskal daerah yang diraih agar mampu secara mandiri mengelola keuangan daerahnya.

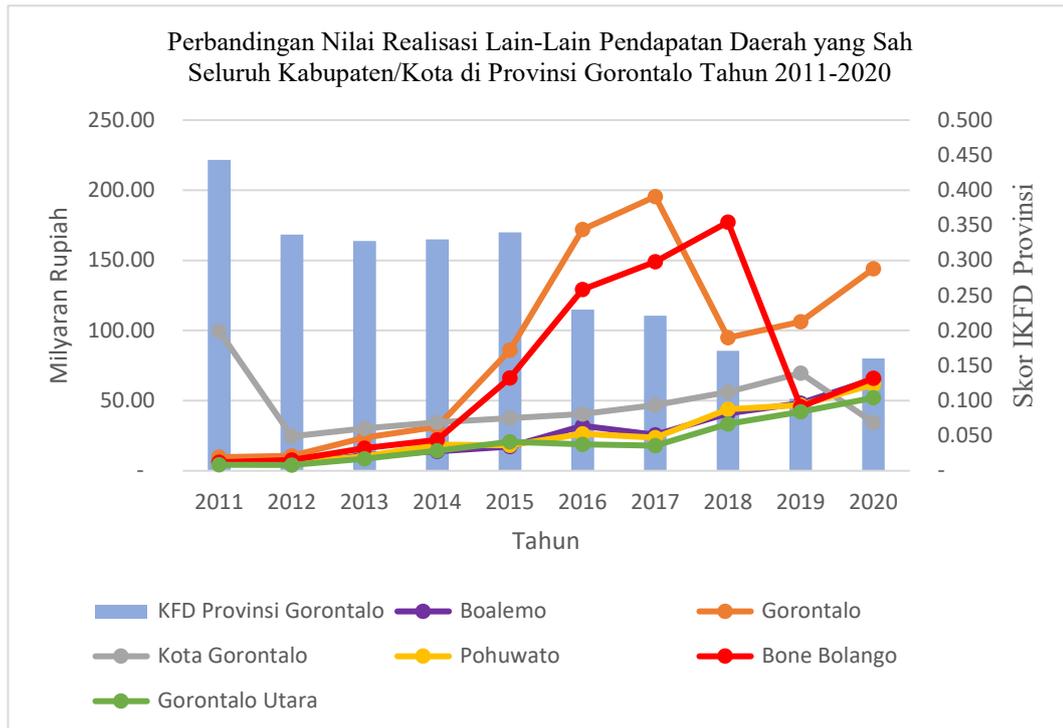


Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, (2022)

Grafik 3 Perbandingan Nilai Realisasi Transfer Bersifat Umum Seluruh Kabupaten/Kota Pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020

Secara keseluruhan berdasarkan grafik 3 transfer bersifat umum/transfer umum fiskal dari pusat kepada daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012-2019 terus mengalami tren kenaikan yang mengindikasikan provinsi Gorontalo terus menerima bantuan transfer keuangan dari pusat dan menjadikan daerahnya menjadi tidak mandiri. Adanya celah dimana pada tahun 2014-2018 dimana seluruh pendapatan transfer umum pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, tingkat kapasitas fiskalnya juga mengalami kumulatif penurunan hingga 26%. Pada tahun 2016 pada saat nilai realisasi bantuan transfer bersifat umum berada pada titik tertingginya, skor indeks kapasitas fiskal daerah provinsi Gorontalo mengalami penurunan atas tahun 2015 yang sebelumnya sempat naik kemudian turun kembali sebanyak 32,35 persen atau sebesar 0,110 satuan skor indeks.

Menurut (The World Bank) tentang transfer ke daerah dijelaskan bahwa dengan adanya pemberian dana berupa transfer penerimaan terhadap Daerah, maka akan sedikit mempengaruhi keuangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, akan tetapi apabila pemberian tersebut adalah dana transfer bersifat umum (*block grant*) dan tidak memiliki kaitan dengan akuntabilitas terhadap pemilihnya akan berkemungkinan pemerintah daerah kurang sigap berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya. Penelitian oleh (Burriel, et al., 2020) menjelaskan kondisi dana transfer umum yang diterima oleh pemerintah daerah karena adanya pembagian porsi keuangan untuk akses pemerataan dan pembangunan dimana melihat bahwa suatu daerah jika belum mampu untuk berdiri sendiri dengan semua potensi ekonomi dan penyelenggaraan program pemerintah daerah yang tepat berdampak menyasar pada layanan publik memadai, maka pemerintah pusat khususnya turut ambil andil dalam pengembangan perekonomian daerah agar nantinya daerah tersebut mampu untuk menjadi mandatory keuangan dan yang mana komponen penyusun APBD tidak berfokus dari kontrol dana pusat sebagai besaran terhadap keuangan daerahnya.



sumber: BPS Provinsi Gorontalo, (2022)

**Grafik 4 Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Seluruh
Kabupaten/Kota Pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020**

Berdasarkan data pada grafik 4 nilai realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah di seluruh kabupaten/kota pada Provinsi Gorontalo pada tahun 2011-2020 cenderung bersifat fluktuatif tidak sejalan dengan data pada kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang terus mengalami tren penurunan hingga tahun 2019. Terdapat ketidaksiharan dimana seharusnya penggunaan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan menurunkan tingkat kapasitas fiskal daerah, namun seakan efeknya dalam porsi APBD terhadap kemandirian keuangan pmda tidak berpengaruh atau bias. Hal ini terlihat pada data tahun 2015-2018 dimana kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo (kecuali kabupaten Gorontalo) mengalami kenaikan atas nilai realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah, skor IKFD provinsi Gorontalo terus mengalami kemerosotan pada tahun yang sama. Hal serupa terjadi ketika terjadi penurunan pada tahun 2019-2020 dimana terjadi ketidakstabilan kondisi ekonomi yang semakin melambat bahkan diperparah dengan kondisi COVID-19 pada tahun 2020 disaat terjadi resesi ekonomi secara nasional tingkat kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo yang merosot pada

Martin Lutther, 2023

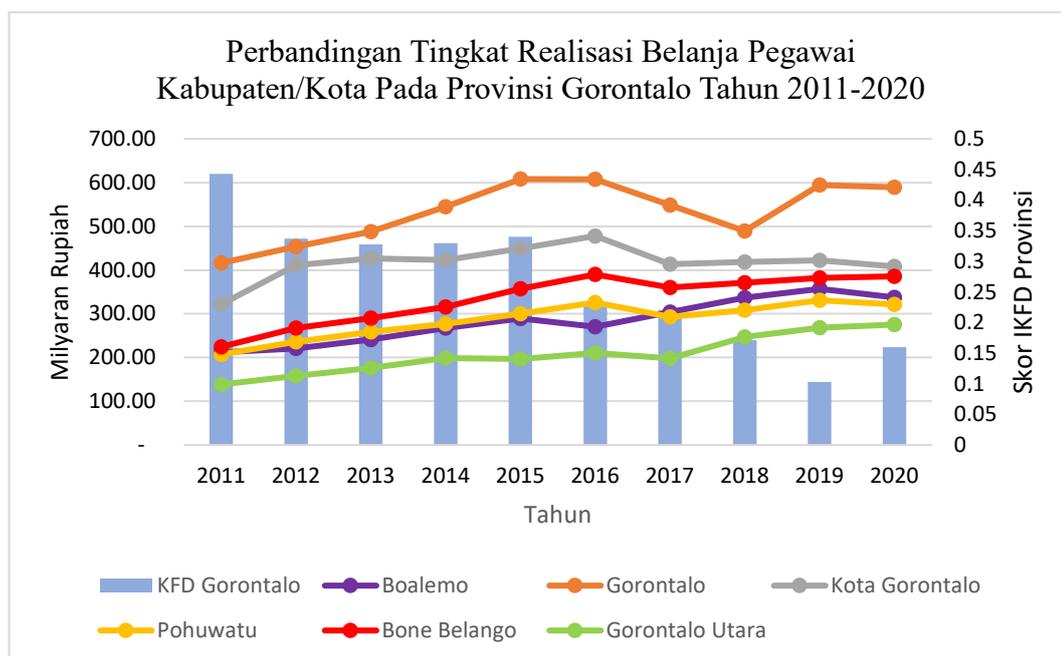
**ANALISIS DETERMINAN PEMBENTUK KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2011-2020**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

tahun 2019 melambung cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 0,160 (secara keseluruhan masih berada pada kategori mandiri sangat rendah).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Verawaty, Fransisca, & Rahmawati, 2017) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis pendapatan pada daerah yang diperoleh dari negara/pusat maupun instansi pemerintah lainnya jika suatu daerah defisit mengalami kondisi kekurangan biaya dalam pagu berjalan atau ketika mengalami kondisi darurat bencana. Sehingga daerah yang mempunyai dana berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam kondisi keuangannya, maka daerah tersebut dapat dikategorikan berada pada kondisi yang belum mandiri.



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, (2022)

Grafik 5 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Seluruh Kabupaten/Kota Pada Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2020

Berdasarkan grafik 5 dimana seluruh kabupaten/kota di provinsi Gorontalo proporsi Belanja Pegawai mengalami kenaikan namun tingkat kapasitas fiskal daerahnya terus mengalami penurunan dari tahun 2011-2019 dan terdapat *anomali* pada data pada grafik dimana pada tahun 2015-2020 dimana naik ataupun turunnya nilai realisasi belanja pegawai tidak mempengaruhi jelas baik kenaikan maupun kenaikan pada skor indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo. Kondisi stabil atas nilai realisasi belanja pegawai yang timbul pada tahun 2019-2020 pun

Martin Lutther, 2023

ANALISIS DETERMINAN PEMBENTUK KAPASITAS FISKAL DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2011-2020

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

ditengah ketidakpastian global serta sempat terjadi restrukturisasi dan *refocusing* anggaran sebagai akibat dari Pandemi COVID-19, tingkat kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo sempat anjlok ke skor 0,103 pada tahun 2019 dan secara signifikan menanjak pada tahun 2020.

Fenomena ini dijelaskan melalui penelitian yang dilakukan oleh (Defiri,2020) menemukan hasil dimana Belanja Pegawai secara signifikan tidak berpengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah suatu daerah. Pengeluaran belanja daerah khususnya melalui belanja untuk pegawai inilah yang berpengaruh terhadap pengadaan layanan fasilitas layanan publik masyarakat dimana terdapat dua dampak dimana dampak positif belanja pegawai adalah untuk produktivitas perangkat daerah untuk kegiatan dan pelaksanaan program pemerintah terkait, namun disisi lain belanja pegawai yang terlalu besar juga dapat membebani kinerja anggaran pemerintah daerah.

I.2. Rumusan Masalah

Provinsi Gorontalo mendapat predikat daerah provinsi yang paling tidak mandiri dimana tingkat kapasitas fiskal daerahnya merupakan yang terendah secara nasional, Permasalahan pendapatan dan pengeluarannya dalam APBD dimana nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat, tetapi masih didominasi dengan besaran penerimaan transfer umum dari negara/pusat kepada pemerintah daerah, dan penggunaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai akomodir dana yang tidak dapat ditanggung dalam anggaran keuangannya menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat karena belum mampu untuk meningkatkan tingkat kapasitas fiskal daerah jadi lebih baik dan mandiri, Sedangkan pada pengeluaran daerahnya lewat belanja pegawai yang terlalu besar justru membebani kinerja anggaran pemerintah daerah sehingga masih menjadi masalah utama yang menjadikan tingkat kapasitas fiskal daerah di Provinsi Gorontalo terbilang sangat rendah. Berdasarkan bahasan latar belakang diatas, dapat diperoleh rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo periode tahun 2011-2020?

2. Bagaimana pengaruh Transfer bersifat Umum terhadap kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo periode tahun 2011-2020?
3. Bagaimana pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo periode tahun 2011-2020?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Pegawai terhadap kapasitas fiskal daerah Provinsi Gorontalo periode tahun 2011-2020?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni, sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo periode tahun 2011-2020.
2. Mengetahui pengaruh dari Transfer bersifat Umum terhadap kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo periode tahun 2011-2020.
3. Mengetahui pengaruh dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo periode tahun 2011-2020.
4. Mengetahui pengaruh dari Belanja Pegawai terhadap kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo periode tahun 2011-2020.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan membawa beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai Tingkat Kapasitas Fiskal Daerah untuk mengukur kemandirian tingkat keuangan daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo serta dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya. Serta dapat menjadi sarana dalam mengembangkan Pemahaman selama pembelajaran di perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Peneliti

Penelitian ini boleh menjadi media pembelajaran yang bermanfaat dalam implementasi atas pengetahuan dan pemikiran penulis terkait dengan permasalahan ekonomi daerah khususnya tingkat kapasitas kemandirian daerah secara fiskal.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan sumbangsi ide serta gagasan terkait mengenai upaya harus dilakukan untuk menciptakan kemandirian keuangan di masa mendatang sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah dan dapat mendukung pemerataan distribusi alokasi anggaran guna menciptakan kesejahteraan penduduk yang ada di daerah terkait.

c) Bagi mahasiswa dan masyarakat

Sebagai rujukan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penelitian serupa dan sebagai upaya untuk mendorong pemikiran kritis mahasiswa terhadap berbagai kondisi kinerja keuangan yang mandiri bagi pemerintah daerah saat ini secara nasional, kemudian juga dapat dijadikan sebagai dorongan untuk menumbuhkan tingkat pengawasan dan partisipatif oleh masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mandiri.